

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU – BUKU

- Giroth, L. M, 2004. *Edukasi dan Profesi Pamong Praja Public Policy Studies, Good Governance and Performance Driven Pamong Praja*, Bandung: C.V. IndraPrahasta.
- Kaho, YosefRiwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia :Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Mustopadidjaja, 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nazir, 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sadu, Irwan, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: C.V. Fokusmedia Anggota IKAPI.
- Siaahan, Marihot, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: P.T. Raja GrafindoPersada.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sunarjo, Unang, 1983. *Tinjauan Sepintas Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung: Tarsito.
- Syaifudin, Azwar, 1997. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Tjahjono Ahmad, dan Triyono Wahyudi, 2003. *Perpajakan Indonesia: Pendekatan Soal Jawab dan Kasus*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.

Rahmawan, Edi, 2012. **Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)**, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*. Volume 1, Edisi 2. Juli-Desember 2012.

Tarigan, K. W, 2013. **Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pbb Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Kota Manado**, *Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3*. 3 Juni 2013.

Makmur, 2010. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PBB - Pajak Bumi Dan Bangunan - Di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Barat**: *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Bisnis (Eksis)*\_Vol. XXII No.2 - November 2012.indd

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang **Pajak Bumi dan Bangunan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang **Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang **Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang **Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan**

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang **Pajak Daerah**

Keputusan Bupati Nomor 32-Penda/2014 tentang **Penetapan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan**

Surat Himbuan Camat Nomor 973/467 tanggal 12 Mei 2014 tentang **Rencana Tahapan Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KADISPENDA**

- 1. Pihak yang terkait dalam PBB-P2?**
- 2. Tugas Dinas Pendapatan Daerah dalam PBB-P2?**
- 3. Bagaimana cara meningkatkan kualitas petugas PBB-P2?**
- 4. Apa hambatan yang terjadi dalam PBB-P2?**
- 5. Upaya dalam pencapaian target PBB-P2?**

**B. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN LURAH**

- 1. Peran Pemerintah Kelurahan Bunut Barat?**
- 2. Apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan PBB-P2?**
- 3. Berapa dan bagaimana cara kerja petugas PBB-P2?**
- 4. Bagaimana cara meningkatkan kualitas petugas PBB-P2?**
- 5. Upaya kelurahan dalam pencapaian target PBB-P2?**

**C. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN CAMAT**

- 1. Peran Pemerintah Kecamatan Kota Kisaran Barat?**
- 2. Apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan PBB-P2?**
- 3. Apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak?**
- 4. Upaya kecamatan dalam pencapaian target PBB-P2?**
- 5.**

## **LAMPIRAN II**

### **D. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA LINGKUNGAN**

- 1. Apa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2?**
- 2. Apa saja fasilitas yang menunjang dalam peningkatan PBB-P2?**

### **E. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT**

- 1. Apa hambatan dalam pembayaran PBB?**
- 2. Bagaimana Kinerja dan Kompetensi petugas pemungut PBB-P2 dalam menjalankan tugasnya?**

